



Buletin Parlementaria



3 Tingkatkan Kemampuan Keamanan Siber



4 Kritik Usulan Kenaikan UKT ke Maba



Obat Mahal Karena Menteri Kurang Komitmen



Komisi I Dukung Korps Wanita TNI AL



Wilayah Terpencil Sulit Akses Program Indonesia Pintar

Nomor 1301/III/VII/2024 Juli 2024



9 772614 339005



Wilayah Terpencil Sulit Akses Program Indonesia Pintar

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti permasalahan mengenai PIP (Program Indonesia Pintar) di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), khususnya di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan informasi yang diterimanya, seringkali para penerima PIP tersebut tidak mengaktifasi, dikarenakan biaya transportasi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan besaran dana yang diperoleh. Dampaknya, PIP tersebut harus dikembalikan ke negara.

"Di sini kami mendapatkan beberapa masukan mengenai PIP yang seringkali tidak diaktifasi oleh para penerimanya dikarenakan dana PIP jauh lebih kecil dari jumlah biaya transportasi yang harus mereka keluarkan demi memperoleh dana tersebut," ucap Andreas se usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi X DPR RI ke SMPN 3 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, Selasa (25/6).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut terus berupaya untuk



Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi X DPR RI ke SMPN 3 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, Selasa (25/6/2024).

mencari solusi bersama. Salah satu usulannya adalah agar pihak perbankan yang mendatangi sekolah-sekolah penerima PIP tersebut. Dengan demikian, upaya untuk memaksimalkan pengalokasian

beasiswa bagi para siswa yang berada di daerah 3T dapat berjalan dengan baik.

"Mesti ada solusi-solusi yang harus kita cari bersama misalnya bank yang mendatangi sekolah dengan demikian kita bisa memaksimalkan beasiswa tersebut untuk anak sekolah," ujarnya.

Menurutnya, perlunya ada perhatian khusus untuk daerah-daerah kepulauan ataupun daerah 3T yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan. Sehingga, ada afirmasi baik dalam program maupun pembiayaan untuk kepentingan daerah-daerah tersebut. Dengan demikian para siswa mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana dengan para siswa yang berada di kota. **mf/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Tingkatkan Kemampuan Keamanan Siber



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menghadiri upacara hari jadi ke-78 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

FOTO: ENQ/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara hari jadi ke-78 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (1/7). Pada Hari Bhayangkara 2024 ini, dirinya berharap Polri semakin sigap mengatasi kejahatan-kejahatan baru yang muncul di tengah perkembangan era digital.

Di antaranya adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) anggota Polri. "Termasuk bagaimana setiap anggota Polri dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman digital sehingga dapat mengantisipasi kejahatan siber," sebut

Puan di Jakarta, Senin (1/7/2024).

Ia juga menambahkan beragam modus kejahatan siber sudah kian marak seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi masyarakat namun tidak dibarengi dengan tingkat literasi digital masyarakat yang rendah.

Ia juga menyoroti masalah ekonomi dalam kejahatan siber yang banyak merugikan masyarakat. Khususnya kasus judi *online* yang semakin menjamur dan meresahkan di Indonesia. "Polri harus bisa menjadi garda terdepan pemberantasan judi *online* yang semakin hari semakin mengkhawatirkan," tegasnya.

um/rdn



Biro Pemberitaan Parlemen



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos.,
Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom.,
Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Set-
yowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan
Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa
Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firda Dysie, Balgeys Maeshyntha,
Anju Alfonso Stimpul, Zutfikar Mubien, Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Arief Rachman,
R. Kresno P.D. Moempoeni, Azka Restu Alfidhillah, Gerald Opie,
Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P,
Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha,
Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita,
Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zutfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrinsa Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Kritik Usulan Kenaikan UKT ke Maba

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengkritik keras usulan Mantan Menteri Pendidikan di era sebelumnya, Muhadjir Effendy. Di mana mantan Menteri tersebut mengusulkan agar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memberlakukan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa baru (maba).

Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu menilai usulan tersebut dapat mempengaruhi minat generasi muda untuk menempuh perguruan tinggi menjadi berkurang. Sebaliknya, Pemerintah harus memastikan biaya perkuliahan semakin murah, terjangkau, dan berkualitas.

“Saya kira tidak perlu pemerintah menaikkan UKT, termasuk ke calon-calon mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa baru. Ini kan jadi beban ke mereka, mereka jadi berpikir ulang mau kuliah kalau biayanya mahal,”



FOTO: JKA/PDI

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar.



SAYA KIRA TIDAK PERLU PEMERINTAH MENAIKKAN UKT, TERMASUK KE CALON-CALON MAHASISWA, MAHASISWA-MAHASISWA BARU. INI KAN JADI BEBAN KE MEREKA, MEREKA JADI BERPIKIR ULANG MAU KULIAH KALAU BIAYANYA MAHAL.

Abdul Muhaimin Iskandar

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra)

katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (3/7).

Pasalnya, lanjut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, tidak semua warga negara kita mampu, para orang tua juga masih banyak yang berpenghasilan rendah. Kalau biaya pendidikan tinggi ikutan tinggi, bagaimana mereka mau kuliah.

Menurutnya, tugas pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045 adalah mencerdaskan bangsa dengan memberikan akses belajar yang mudah dan murah bagi seluruh masyarakat. “Amanat UUD 1945 adalah tugas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah berbisnis dengan mahasiswa melalui tarif UKT yang sangat mahal,” tegasnya.

ayu/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Obat Mahal Karena Menteri Kurang Komitmen

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Perindustrian dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengatakan, harga alat-alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Indonesia jauh lebih mahal daripada di negara lain. Hal ini dikarenakan masih ada pejabat yang kurang memiliki visi dan komitmen dalam membangun industri dalam negeri di bidang kesehatan.

Hal itu disampaikan dalam rangka menanggapi keluhan presiden terkait mahalnya harga alkes dan obat-obatan di Indonesia dibandingkan Malaysia. Karena itu, presiden meminta agar kementerian terkait segera menyelesaikan persoalan tersebut.

“Masih ada pejabat dan menteri yang tidak bisa memahami dan tidak bisa menjabarkan visi industri dan komitmen Presiden dalam membangun industri dalam negeri. Sudah beberapa kali Presiden mengeluhkan soal impor ini,” kata Gobel



FOTO: AZK/PDT

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel.

dalam keterangan tertulis kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Rabu (3/7).

Diketahui, Menkes Budi Gunadi Sadikin bahkan mengatakan harga obat di Indonesia lebih mahal 3-5 kali lipat dibandingkan dengan di Malaysia. Pada sisi lain, industri

farmasi Indonesia justru tak tumbuh dengan baik di tengah harga yang mahal tersebut. Bahkan BUMN farmasi dan kesehatan Indonesia juga sedang sekarat. Obat dan alkes di Indonesia masih sangat didominasi oleh impor.

“Jangan cuma bisa berdagang, tapi bagaimana membuat barang dengan membangun industri dalam negeri dan menciptakan nilai tambah,” kata Politisi Fraksi Partai Nas-Dem ini.

Kecenderungan untuk mengutamakan impor daripada membangun industri dalam negeri, kata Gobel, juga terjadi beberapa waktu lalu. Pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No 36 Tahun 2023 dengan Permendag No 8 Tahun 2024. Permendag No 8 ini memberikan relaksasi bagi impor elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan asesoris pakaian jadi, tas, dan katup.

[azk/rdn](#)



MASIH ADA PEJABAT DAN MENTERI YANG TIDAK BISA MEMAHAMI DAN TIDAK BISA MENJABARKAN VISI INDUSTRI DAN KOMITMEN PRESIDEN DALAM MEMBANGUN INDUSTRI DALAM NEGERI. SUDAH BEBERAPA KALI PRESIDEN MENGELUHKAN SOAL IMPOR INI.

Rachmat Gobel

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang)

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Komisi I Dukung Korps Wanita TNI AL

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz, memberikan dukungan penuh kepada Komandan Wanita Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Bandung, Kolonel Laut Renny Setiowati, dalam kunjungan kerja spesifiknya ke Lanal Bandung. Meutya menekankan pentingnya peningkatan jumlah komandan perempuan di TNI AL, mengingat saat ini hanya ada tiga komandan wanita di Indonesia.

"Jadi di Indonesia hanya ada tiga komandan saat ini dan itu cukup langka yang pertama ada di Malang, di Yogyakarta dan kemudian di Bandung. Komisi I DPR tentu mendorong agar terus lebih banyak komandan-komandan perempuan dari Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal). Karena kita yakin kowal-kowal kita juga sudah siap," ujar Meutya Hafidz usai kunjungan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/7).

Ia juga mengungkapkan bahwa Komisi I DPR sedang berupaya agar di masa depan lebih banyak perempuan yang menduduki posisi strategis,



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz saat memimpin kunjungan kerja spesifiknya ke Lanal Bandung.

termasuk di posisi Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal). "Bahkan kita juga

tengah mendorong agar di posisi Danlantamal juga nanti *insyaAllah* akan ada perempuan. Karena kita juga percaya bahwa sekarang sedang ada gerakan yang mendorong *women for peace*," tambah Meutya.

Ia yakin bahwa para wanita di TNI AL memiliki kemampuan dan kesiapan untuk memegang posisi-posisi penting dan strategis, serta berkontribusi dalam gerakan global untuk perdamaian melalui kepemimpinan perempuan. Dukungan dari Komisi I DPR diharapkan dapat membuka jalan bagi lebih banyak wanita untuk berkarir di bidang pertahanan dan keamanan, serta menciptakan perubahan positif dalam struktur TNI AL. **blf/aha**

BAHKAN KITA JUGA TENGAH MENDORONG AGAR DI POSISI DANLANTAMAL JUGA NANTI *INSYAALLAH* AKAN ADA PEREMPUAN. KARENA KITA JUGA PERCAYA BAHWA SEKARANG SEDANG ADA GERAKAN YANG MENDORONG *WOMEN FOR PEACE*.

Meutya Hafidz

Ketua Komisi I DPR RI

FOTO: BLF/PPDT



Polemik Aset Pertanahan Diselesaikan Lintas Kementerian

Pelepasan aset milik negara menjadi polemik pertanahan yang tak kunjung usai. Di Kota Surabaya, Jawa Timur terdapat dua fenomena terkait dengan hal ini yaitu kasus 'Tanah Surat Ijo' dan kejelasan tanah milik PT KAI yang telah dihuni oleh masyarakat selama puluhan tahun.

Anggota Komisi II DPR RI, Hugua menilai bahwa penyelesaian konflik pertanahan di Kota Surabaya harus melibatkan koordinasi setingkat kementerian. Hal ini diungkapkannya usai rapat kunjungan kerja Spesifik ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Surabaya pada Senin (1/7).

"Saya kira reformasi agraria di Jawa Timur berjalan baik, namun ada beberapa yang memang lagi harus dinaikan ke tingkat yang lebih tinggi, yang berkaitan dengan kasus 'Surat Ijo' yah dan beberapa tanah-tanah di kawasan perkeretaapian KAI," tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.



FOTO: UCAPDPT

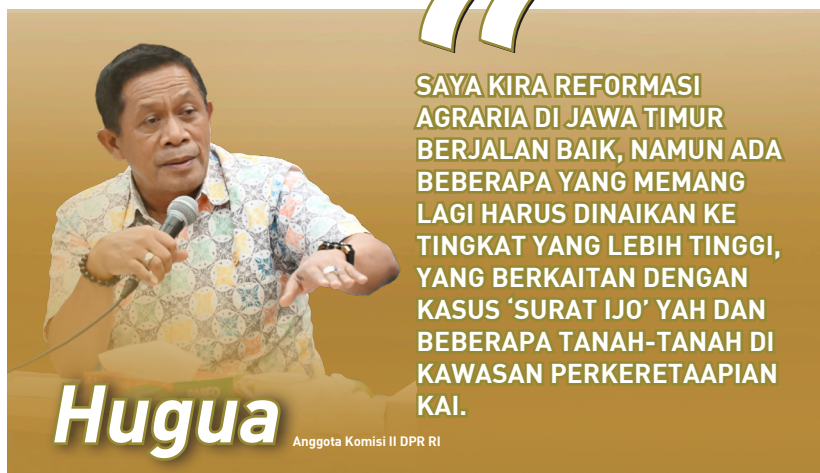
Anggota Komisi II DPR RI, Hugua saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Spesifik ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Surabaya, (1/7/2024).

'Tanah Surat Ijo' merujuk pada tanah aset pemerintah Kota Surabaya yang dikuasai dan dipergunakan oleh masyarakat secara turun temurun. Izin Pemakaian Tanah (IPT) atas lahan tersebut dikeluarkan menggunakan map berwarna hijau yang kemudian

menjadi awal penyebutan 'Tanah Surat Ijo'.

Seiring waktu, masyarakat pemegang Izin Pemakaian Tanah (IPT) tersebut menghendaki agar tanah yang dikuasai dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik. Lebih lanjut, Hugua menyampaikan bahwa polemik ini tidak bisa diurai sekadar di level pemerintah daerah setempat lantaran kerap ditemukan sandungan saat akan "memecah" dan menyerahkan aset kepada masyarakat.

"Karena begitu masuk aset, masing-masing maka tidak terla-lu gampang untuk dipecah ke masyarakat. Tetapi ini diperlukan para pengambil keputusan lebih tinggi di antara lintas kementerian. Saya kira ini penting sebab kalau diselesaikan pada level Wali Kota atau pemma setempat itu tetap ada benturan-benturan," tutup legislator Dapil Sulawesi Tenggara itu. **uc/aha**



SAYA KIRA REFORMASI AGRARIA DI JAWA TIMUR BERJALAN BAIK, NAMUN ADA BEBERAPA YANG MEMANG LAGI HARUS DINAIKAN KE TINGKAT YANG LEBIH TINGGI, YANG BERKAITAN DENGAN KASUS 'SURAT IJO' YAH DAN BEBERAPA TANAH-TANAH DI KAWASAN PERKERETAAPIAN KAI.

Hugua

Anggota Komisi II DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Johan Budi Pertanyakan Penyebab Citra KPK Turun

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi S. Pribowo menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini citra instansinya tidak cukup baik dipandang masyarakat. Bahkan dari hasil survei yang dilakukan oleh salah satu media, Litbang Kompas, menempatkan KPK di urutan ke delapan, di bawah Polri, Kejaksaan, bahkan di bawah DPR RI juga.

“Apa kendala yang sedang terjadi di dalam internal KPK atau diantara KPK dengan insan penegak hukum lain mungkin. Sekarang waktunya tepat untuk mengungkapkannya kepada kami, Komisi III. Hingga perlu ada langkah konkret yang kemudian harus dilakukan oleh KPK,” ujar Johan Budi dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/7).

Kendala yang dimaksud tersebut tentu terkait pelaksanaan fungsi kewenangan KPK, baik di bidang penindakan, *monitoring*, pengawasan, koordinasi, serta yang berkaitan dengan pencegahan termasuk pendidikan dan pelayanan masyarakat. Pasalnya, beberapa waktu lalu Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini



Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi S. Pribowo usai rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).

mendapat laporan dari masyarakat Brebes, Jawa Tengah terkait penilaian masyarakat terhadap program sosialisasi antikorupsi di masyarakat.

“Menurut masyarakat, percuma

sosialisasi anti korupsi yang dilakukan KPK kepada masyarakat, karena apa yang dilakukan oleh insan KPK, ada yang tidak bisa dicontoh oleh masyarakat. Atau malah berperilaku tidak menunjukkan apa yang disosialisasikannya kepada masyarakat,” tambahnya.

Terlebih lagi beberapa waktu yang lalu, pihaknya melihat ada ketegangan di KPK, antara Nurul Ghufron dengan dewas (dewan pengawas) KPK. Pihaknya meyakini Komisi III DPR akan melakukan apa-apa saja yang bertujuan untuk memperkuat KPK, dan mengembalikan KPK seperti zaman dulu dimana setiap survei dilakukan selalu menempati urutan di atas. **ayu/aha**



MENURUT MASYARAKAT, PERCUMA SOSIALISASI ANTI KORUPSI YANG DILAKUKAN KPK KEPADA MASYARAKAT, KARENA KARENA APA YANG DILAKUKAN OLEH INSAN KPK, ADA YANG TIDAK BISA DICONTOH OLEH MASYARAKAT. ATAU MALAH BERPERILAKU TIDAK MENUNJUKKAN APA YANG DISOSIALISASIKANNYA KEPADA MASYARAKAT.

Johan Budi S. Pribowo

Wakil Ketua Komisi II DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya

Keberanian Atasi Alih Fungsi Lahan Pertanian

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyatakan, harus ada keberanian dan *'goodwill'* dalam mengatasi persoalan alih fungsi lahan pertanian dan tingkat produksi pangan. Pemerintah harus memiliki kebijakan yang jelas terkait kedua permasalahan tersebut guna melindungi kepentingan nasional.

"Yang paling penting menurut saya adalah kita berani untuk memotong penugasan impor ini. Karena itu pengaruhnya bukan hanya kepada gairah petani dan juga kerugian pengusaha penggilingan padi saja tetapi lebih jauh penting adalah soal kemandirian kita sebagai bangsa. Menurut saya, kebijakan pemerintah yang ada saat ini tidak jelas dan keluar dari fungsi utama yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia," ujar Johan di Bantul, Yogyakarta, Senin (1/7).

Dikatakannya, dari beberapa



FOTO: DEPP/PT

Anggota Komisi IV DPR RI Johan saat mengikuti Kunspek Komisi IV DPR RI di Bantul, Yogyakarta, Senin (1/7 2024).

diskusi yang dilakukan Komisi IV DPR bersama dengan mitra kerja

nampak bahwa permasalahan alih fungsi lahan itu menjadi salah satu soal dan penambahan penduduk menjadi persoalan yang lainnya.

"Ada kondisi bahwa alih fungsi lahan meningkat, artinya lahan pertanian kita semakin menyempit dan di saat yang sama penambahan penduduk juga mengalami peningkatan. Belum lagi persoalan impor yang kemudian dikeluhkan oleh Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia. Ini patut menjadi perhatian kita," tambahnya.

Johan menegaskan, diskusi tentang peningkatan produksi tidak boleh hanya bicara soal peningkatan indeks tanam saja, akan tetapi rentetannya ke bawah sampai hilirnya juga harus menjadi perhatian. **dep/aha**



ADA KONDISI BAHWA ALIH FUNGSI LAHAN MENINGKAT, ARTINYA LAHAN PERTANIAN KITA SEMAKIN MENYEMPIT DAN DISAAT YANG SAMA PERTAMBAHAN PENDUDUK JUGA MENGALAMI PENINGKATAN. BELUM LAGI PERSOALAN IMPOR YANG KEMUDIAN DIKELUHKAN OLEH PERSATUAN PENGUSAHA PENGGILINGAN PADI DAN BERAS INDONESIA. INI PATUT MENJADI PERHATIAN KITA.



Johan Rosihan

Anggota Komisi IV DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



IKN Didesain Jadi Kawasan Berkelanjutan

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (2/7). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meninjau secara langsung progres pembangunan infrastruktur dan transportasi yang sedang, telah, dan akan dilakukan. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, Pemerintah perlu menyampaikan hasil evaluasi dan capaian atas target yang telah ditentukan.

Selain jajaran Anggota Komisi V DPR RI dari lintas fraksi, kunspek ini didampingi oleh para pejabat dari mitra kerja Komisi V DPR RI, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, dan BNPP/Basarnas. Lasarus menjelaskan, pembangunan IKN harus menjadi upaya untuk mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris.

Menurutnya, IKN Nusantara harus didesain sebagai kawasan pertumbuhan baru dengan semua



Ketua Komisi V DPR RI Lasarus melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (2/7/2024).

kriteria yang meliputi *smart*, *green*, dan *sustainable*. Pemerintah harus memanfaatkan momentum akselerasi pembangunan nasional

untuk mewujudkan visi Indonesia 2045.

“Oleh karena itu, pada kesempatan Kunjungan Kerja ini, Pemerintah perlu menyampaikan hasil evaluasi dan capaian atas target yang telah ditentukan, terkait progres pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan, penyerapan anggaran, kendala dan upaya mengatasi permasalahan dalam pembangunan IKN ini,” papar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Komisi V DPR RI menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di IKN ini tidak boleh mengabaikan aspek kualitas. Di mana kualitasnya harus sesuai standar teknis, baik desain maupun dalam pelaksanaan konstruksi dan rencana pemanfaatannya. **ssb/rdn**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Susun Strategi Mitigasi Tingkatkan Keamanan Siber

Republik Indonesia beberapa waktu ini ramai membahas mengenai adanya serangan *ransomware* yang meretas Pusat Data Nasional (PDN). Melihat kejadian ini, Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk juga segera menyusun strategi sebagai langkah mitigasi untuk meningkatkan keamanan siber.

“Saya menyampaikan isu ini (serangan *ransomware* terhadap PDN) karena saya melihat kelemahan di banyak BUMN soal keamanan siber ya. Saya kira Pelindo juga harus hati-hati soal itu,” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Direktur Utama PT Pelindo yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).



FOTO: MR/PPD

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Direktur Utama PT Pelindo yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

A graphic featuring a quote from Deddy Yevri Hanteru Sitorus. The quote is written in bold, yellow, uppercase letters on a dark brown background. To the left of the quote is a small image of Deddy Yevri Hanteru Sitorus speaking. Below the quote is his name in large, white, italicized font, followed by his title as a member of the Indonesian House of Representatives.

APALAGI KAYA KOMINFO KEMARIN ENGGAK ADA BACKUP-NYA PAK, ITU CELAKA BETUL ITU. PADAHAL KITA TAHU SALAH SATU CARA MENGEFISIENKAN BISNIS KITA ADALAH MELALUI DIGITALISASI. NAH KALAU DIGITALISASINYA DIANGGAP BARANG SAMPINGAN BAHAYA PAK, KITA BISA SALAH MENENTUKAN ARAH KEBIJAKAN KORPORASI.

Deddy Yevri Hanteru Sitorus
Anggota Komisi VI DPR RI

Beberapa Badan Usaha Milik Negara seperti Pertamina dan Bank BSI diketahui juga sempat memiliki permasalahan keamanan siber. Oleh karena itu, menurutnya penting bagi BUMN untuk memperhatikan mitigasi terhadap keamanan siber ini, terlebih ini menyangkut bisnis dan masyarakat sebagai konsumen.

“Apalagi kaya Kominfo kemarin *enggak* ada *backup*-nya Pak, itu celaka betul itu. Padahal kita tahu salah satu cara mengefisienkan bisnis kita adalah melalui digitalisasi. Nah kalau digitalisasinya dianggap barang sampingan bahaya Pak, kita bisa salah menentukan arah kebijakan korporasi,” tegasnya.

gal/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



DAMPAK BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI GORONTALO AKIBAT TAMBANG ILEGAL



Tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Bone Bolango mengalami longsor pada Sabtu (6/7) sekitar 23.45 Wita. Tim SAR gabungan kemudian diterjunkan ke lokasi untuk mencari dan mengevakuasi korban. Kondisi cuaca menjadi tantangan tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian korban.

Jumlah Korban
325

Meninggal Dunia
26

Tidak diketahui
19



Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Pemerintah segera membentuk satgas Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Hal itu menyusul terjadinya bencana longsor besar tambang emas di Kecamatan Suwawa Timur, Provinsi Gorontalo, pada Minggu, 7 Juli 2024 lalu yang memakan korban sebanyak 325 orang. "Kami berharap Pemerintah hadir dan tidak membiarkan praktik pengelolaan tambang rakyat yang berisiko tinggi tersebut. Apalagi draf Keppres pembentukan satgas pemberantasan PETI sudah di meja presiden sejak lama."

Sumber : BNPB, SAR, Detik.com

Kategorisasi Penerima Perlinsos Perlu Diperluas

Komisi IX DPR RI mendorong Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menambah kategori penerima jaminan sosial. Selama ini, program jaminan sosial di Kulon Progo telah berjalan dan menysasar kelompok usia rentan. Namun, menurutnya, perlu adanya penambahan jumlah penerima, salah satunya berasal dari pekerja rentan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IX DPR RI di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (26/6/24). "Pekerja rentan merupakan kelompok yang sangat membutuhkan perlindungan sosial. Kami ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan hak yang sama seperti pekerja lainnya, terutama dalam hal jaminan sosial," ucapnya kepada **Parlementaria**.

Politikus Fraksi PKB ini menjelaskan, Kulon Progo telah menjalankan program jaminan sosial bagi pekerja rentan, seperti jaminan sosial bagi Pekerja Sadap Nira Kelapa atau yang



FOTO: uf/pdt

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IX DPR RI di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (26/6/24).

kerap disebut Penderes. Program ini juga dijumpai di Gorontalo, yang mana jaminan sosial dinilai sesuai dengan penerapannya.

Namun, jaminan sosial bagi kaum pekerja rentan dirasa kurang meluas. Lantaran, kategori penerima jaminan sosial masih sedikit. Padahal apabila dilihat dari segi kewilayahan, banyak pekerja rentan di Kulon Progo membutuhkan manfaat jaminan sosial.

Perlu diketahui pekerja sadap nira termasuk dalam sektor pertanian. Penerima jaminan sosial sebenarnya tak hanya untuk pekerja penyadap nira. Di sektor pertanian masih perlu perluasan kebermanfaatannya jaminan sosial, seperti jaminan sosial untuk petani, buruh tanam, serta peternak. Hal ini perlu ditegaskan, karena sektor pertanian di Kulon Progo merupakan penopang ekonomi daerah.

uf/rdn



PEKERJA RENTAN MERUPAKAN KELOMPOK YANG SANGAT MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN SOSIAL. KAMI INGIN MEMASTIKAN BAHWA MEREKA MENDAPATKAN HAK YANG SAMA SEPERTI PEKERJA LAINNYA, TERUTAMA DALAM HAL JAMINAN SOSIAL.

Nihayatul Wafiroh

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Serap Aspirasi Panja Pembiayaan Pendidikan di Batang

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyerap aspirasi dari tenaga pendidik di Kabupaten Batang. Meski belum memiliki problem pembiayaan yang serius, namun Panja menerima masukan soal sarana-prasarana pendidikan yang ternyata masih minim di kabupaten ini.

Hal ini dikemukakan oleh Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja. Ia mendapati bahwa di Kabupaten Batang tidak ditemukan permasalahan pembiayaan pendidikan yang serius. Tetapi ada masukan yang mendasar yakni *mandatory spending* 20% dan sarana-prasarana pendidikan yang kurang serta PPPK yang meresahkan.

"Kunjungan kerja ini merupakan kunjungan kerja spesifik Panja Pembiayaan Pendidikan, di mana maksud kunjungan ini adalah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap



Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (5/7/2024).

pemenuhan *mandatory spending* 20% bidang pendidikan dalam APBN dan APBD," katanya di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (5/7).

Ia menegaskan bahwa sebanyak 52 persen dari 20 persen anggaran pendidikan itu disalurkan melalui transfer dana daerah dan dana desa, "Agar mereka paham bahwa sarana prasarana itu bukan hanya tugas Kemendikbudristek RI tetapi juga bisa dimintakan ke daerah, kota dan provinsinya," jelasnya.

Masukan lainnya yaitu, bahwa di Kabupaten Batang terkait Guru PPPK swasta yang ditempatkan di negeri minta dikembalikan ke swasta. "Mereka tidak paham karena itu menyangkut undang-undang, sementara mereka mengusulkan PPPK di sekolah swasta agar dikembalikan ke sekolah swasta, itu harus revisi undang-undang," tambahnya. **cas/aha**

KUNJUNGAN KERJA INI MERUPAKAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PANJA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, DIMANA MAKSUD KUNJUNGAN INI ADALAH DALAM RANGKA MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN MANDATORY SPENDING 20% BIDANG PENDIDIKAN DALAM APBN DAN/APBD.

Sodik Mudjahid

Anggota Komisi X DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Dolfie Tolak Tegas PMN untuk Bank Tanah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp6,1 Triliun bagi sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Bank Tanah. Namun, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P menolak dengan secara tegas persetujuan PMN bagi Bank Tanah.

“Mengenai Bank Tanah, dulu kita pernah rapat pendalaman pada 9 November 2022, kami belum menyetujui PMN Rp500 miliar saat itu, tapi akhirnya terbit juga PP yang memberikan PMN pada Bank Tanah, ini mohon diklarifikasi dulu,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (1/7).

Ia merasa rekomendasi dari hasil rapat pendalaman yang telah



FOTO : FHN/PDI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).



MENGENAI BANK TANAH, DULU KITA PERNAH RAPAT PENDALAMAN PADA 9 NOVEMBER 2022, KAMI BELUM MENYETUJUI PMN RP500 MILIAR SAAT ITU, TAPI AKHIRNYA TERBIT JUGA PP YANG MEMBERIKAN PMN PADA BANK TANAH, INI MOHON DIKLARIFIKASI DULU.



Dolfie O.F.P

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

dilakukan oleh Komisi XI DPR RI tidak didengar oleh Pemerintah. “Kami intinya belum dapat menyetujui ketika itu, eh tahu-tahu keluar (PP). Apa gunanya rekomendasi yang kita rapatkan kalau seperti itu,” tuturnya.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun mengusulkan untuk menolak persetujuan PMN terhadap Bank Tanah untuk 2024 serta dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait pemberian suntikan PMN bagi Bank Tanah setelah rapat tersebut.

“Untuk Bank Tanah saya usulkan kita keluarkan dari permintaan pendalaman, dalam artian kita tidak setuju untuk dialokasikan di 2024 sebelum *clear* ini masalah,” tegasnya.

[gal/rdn](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Dukung PMN 1 Triliun untuk Hutama Karya

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendukung pemberian suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Hutama Karya sebesar Rp1 triliun. Terlebih, adanya PMN ini diperuntukan untuk penyelesaian pembangunan tol Sumatera terutama tol Palembang-Betung. Ia juga mendukung adanya pengembangan bisnis bagi PT Hutama Karya selaku BUMN yang mendapat banyak mandat proyek dari Pemerintah.

"Alokasi (PMN) satu triliun ini menurut saya sudah tepat, tinggal bagaimana ini segera diwujudkan. Karena kalau tidak, Palembang-Betung ini akan terkatung-katung terus pekerjaan dan pengerjaannya. Karena pengalihan dari Waskita Karya ini ada beberapa kendala untuk *soft landing* di lapangannya," ujarnya di dalam rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).

Adanya PMN bagi PT Hutama Karya ini dijelaskan oleh Budi



Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, PT Hutama Karya, PT Pelayaran Nasional Indonesia, dan Badan Bank Tanah di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Hartono selaku Direktur Utama, di antaranya untuk memperbaiki

struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas PT Hutama Karya. Dalam rangka melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang sebelumnya diberikan kepada PT Waskita Karya. Kemudian, melanjutkan pengusahaan ruas jalan tol Palembang-Betung dan meningkatkan konektivitas *backbone* JTTS dari Bakauheni hingga Jambi.

"Ini (Pembangunan ruas tol) harus diselesaikan segera, maka saya memberikan dukungan untuk ini supaya bisa segera diwujudkan. Apalagi ini mengenai porsi ekuitas pemerintah di sana. Sehingga Palembang-Betung ini bisa benar-benar Pemerintah *dedicated* memilikinya," jelas Politisi Fraksi Partai Golongan Karya itu. [gal/rdn](https://www.gal.rdn)



ALOKASI (PMN) SATU TRILIUN INI MENURUT SAYA SUDAH TEPAT, TINGGAL BAGAIMANA INI SEGERA DIWUJUDKAN. KARENA KALAU TIDAK, PALEMBANG-BETUNG INI AKAN TERKATUNG-KATUNG TERUS PEKERJAAN DAN Pengerjaannya. KARENA PENGALIHAN DARI WASKITA KARYA INI ADA BEBERAPA KENDALA UNTUK *SOFT LANDING* DI LAPANGANNYA.

Mukhamad Misbakhun

Anggota Komisi XI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Indonesia Siap Gelar Pertemuan Kedua IPPP

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI akan mengadakan pertemuan dengan parlemen-parlemen negara kawasan pasifik. Pertemuan *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP) ini akan mengundang 16 negara kawasan pasifik dan merupakan perhelatan kedua yang pernah digelar.

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menjabarkan, forum ini pertama kali kita lakukan ditahun 2018. Tapi karena Covid-19 terdapat penundaan, belum lagi DPR RI pada tahun 2022 menjadi tuan rumah IPU. "Jadi baru sekarang bisa kita laksanakan pertemuan yang kedua ini dan kita berharap akan ada partisipasi yang cukup tinggi dan aktif dari Parlemen negara-negara pasifik," ungkapnya ditemui di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).

Pelaksanaan IPPP kedua ini



FOTO: AFR/PDT

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon.

mulai dari 24-26 Juli 2024 di Jakarta. Fadli menyebut, saat ini sudah tujuh

negara yang konfirmasi dan akan menyusul beberapa negara lainnya. "Ketua-ketua parlemen mereka juga beberapa sudah konfirmasi akan hadir, termasuk kita mengundang kedutaan besar dari negara pasifik yang ada di sini yaitu Papua Nugini dan Fiji," kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

la mengharapkan forum ini akan membuka dialog dan komunikasi sesama negara yang berada di kawasan pasifik. Indonesia yang kawasan kepulauannya bersentuhan dengan dua samudera punya posisi yang penting dalam geopolitik kawasan ini.

"Sebagian besar kita sudah mengenal mereka. Sehingga jika ada isu-isu yang terkait, misalnya tentang situasi di Papua dan lain-lain kita bisa menjelaskan dengan gamblang. Tentu saja (forum) ini penting bagi kepentingan nasional kita. **aha**



KETUA-KETUA PARLEMEN MEREKA JUGA BEBERAPA SUDAH KONFIRMASI AKAN HADIR, TERMASUK KITA MENGUNDANG KEDUTAAN BESAR DARI NEGARA PASIFIK YANG ADA DISINI YAITU PAPUA NUGINI DAN FIJI.

Fadli Zon
Ketua BKSAP DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



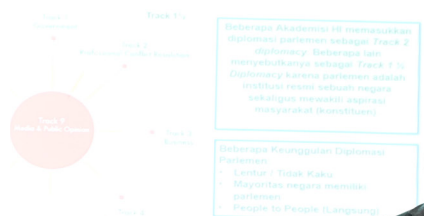
Peran Pemuda Realisasikan Pariwisata Berkelanjutan

Berbagai upaya sangat diperlukan untuk mendorong peran pemuda dalam merealisasikan pariwisata yang berkelanjutan. Karena itu, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana, menyampaikan harapannya agar generasi muda, termasuk mahasiswa, dapat berperan aktif dalam pengembangan pariwisata di Indonesia.

Harapan tersebut disampaikan Putu kepada mahasiswa *Batam Tourism Polytechnic* (BTP) dan *Batam Institute of Technology* (ITEBA) dalam kegiatan BKSAP Day yang mengangkat tema 'Peran Diplomasi Parlemen dalam Mendukung Promosi Pariwisata Berkelanjutan'. Putu menekankan bahwa Batam memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi pariwisata utama di Indonesia, berkat kedekatannya dengan negara-negara tetangga ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Putu menjelaskan tiga elemen utama yang harus dijunjung tinggi

1. PARLEMEN DALAM SKEMA DIPLOMASI TOTAL



Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana, saat menyampaikan materi dalam kegiatan BKSAP Day di Batam Tourism Polytechnic, Batam, Kepulauan Riau, Senin (01/07/2024).

dalam keramahan (*hospitality*) Indonesia, yaitu hubungan manusia, menjaga lingkungan, dan pemahaman spiritual.

"Hospitality dari Indonesia harus

mengutamakan hubungan manusia, menjaga lingkungan, dan memberikan persembahan yang baik untuk semesta alam dan Yang Kuasa," tuturnya kepada **Parlementaria** usai ditemui di BTP, Batam, Kepulauan Riau, Senin (1/7).

Acara BKSAP Day ini diharapkan mampu menginspirasi generasi muda untuk berperan aktif dalam industri pariwisata, mempromosikan kekayaan budaya dan keindahan Indonesia, serta memastikan pariwisata berkembang secara berkelanjutan. Caranya dengan menjaga keseimbangan alam dan masyarakat. Sehingga, ia berharap bahwa upaya ini akan membawa Indonesia menuju masa depan pariwisata yang lebih cerah dan berkelanjutan. **gys/rdn**

HOSPITALITY DARI INDONESIA HARUS MENGUTAMAKAN HUBUNGAN MANUSIA, MENJAGA LINGKUNGAN, DAN MEMBERIKAN PERSEMBAHAN YANG BAIK UNTUK SEMESTA ALAM DAN YANG KUASA.

Putu Supadma Rudana

Wakil Ketua BKSAP DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Potensi PNBP Belum Tergali Secara Optimal

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Hendrawan Supratikno menilai potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih belum tergali dan dimanfaatkan dengan maksimal. Hal ini dikatakannya, mengingat Indonesia mempunyai Sumber Daya Alam yang besar, namun penerimaannya dinilai masih sangat minim untuk negara.

“Jadi kan PNBP ini sumbernya tiga, sumber daya alam, kekayaan negara yang dipisahkan, dan pelayanan publik. Nah, untuk negara dengan sumber daya alam yang besar seperti Indonesia, PNBP biasanya itu 35-45 persen dari pendapatan negara. Tetapi di Indonesia kan baru antara 20-25 persen,” kata Hendrawan saat ditemui usai melakukan *Forum Group Discussion* dengan BPK RI, di Ruang Rapat BPK RI, Jakarta, Senin (1/7).



FOTO: RSB/PDT

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Hendrawan Supratikno saat ditemui usai melakukan Forum Group Discussion dengan BPK RI, di Ruang Rapat BPK RI, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Dalam rapat ini, BAKN DPR RI melakukan penelaahan terhadap

LHP BPK RI terkait PNBP. Hendrawan mengungkapkan, hal ini guna PNBP bisa lebih meningkat di tahun yang akan datang.

“Jadi intinya kita semua berharap PNBP ini di masa-masa mendatang bisa ditingkatkan. Nah, persoalannya adalah bagaimana pengelolaan yang baik agar penerimaan bukan pajak ini dari waktu ke waktu bisa dioptimalkan,” terang Politisi PDI-Perjuangan ini.

Lebih lanjut, Hendrawan mengungkapkan ada potensi kurang lebih 10-15 persen PNBP lagi yang masih bisa dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan hal ini, Hendrawan menilai ada beberapa hal yang bisa dilakukan, satu diantaranya yakni merevisi UU. **we/aha**



Hendrawan Supratikno

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



MKD Sosialisasi TNKB Ke Polda Kepri

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya kasus mobil memakai pelat DPR palsu. Sehingga diperlukan pengawasan ketat terhadap penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DPR RI.

Hal ini disampaikan pada saat Kunjungan Kerja ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kepulauan Riau (Kepri) guna upaya menjaga muruah DPR RI dalam menanggulangi penggunaan TNKB DPR RI palsu yang kian marak.

Politisi PKS ini dalam sambutannya menjelaskan dua hal utama dalam kunjungan ke Polda Kepri. Pertama, pentingnya tugas MKD DPR RI dalam menjaga kehormatan anggota DPR RI saat melaksanakan tugas dan fungsinya. Kedua, ia menekankan



Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun saat memimpin Kunjungan Kerja MKD DPR RI di Mapolda Kepri, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (8/7/2024).

bahwa kehadirannya bertujuan untuk memberikan penegasan kepada aparat kepolisian, khususnya

Direktorat Lalu Lintas, agar tidak ragu menindak penggunaan TNKB DPR RI palsu.

"Kami ingin memberikan penegasan agar jangan ada keragu-raguan dari anggota kepolisian khususnya Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) apabila patut dicurigai melihat adanya penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DPR RI," katanya usai memimpin Kunjungan Kerja MKD DPR RI di Mapolda Kepri, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (8/7).

Lebih lanjut, Adang yang juga mantan Wakapolri tahun 2004 silam ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap penggunaan TNKB palsu yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dirinya menekankan bahwa hal ini tidak hanya merugikan anggota DPR RI secara langsung, tetapi juga mencoreng muruah lembaga DPR RI itu sendiri. **oji/aha**



KAMI INGIN MEMBERIKAN PENEGASAN AGAR JANGAN ADA KERAGU-RAGUAN DARI ANGGOTA KEPOLISIAN KHUSUSNYA DIREKTORAT LALU LINTAS (DIRLANTAS) APABILA PATUT DICURIGAI MELIHAT ADANYA PENGGUNAAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) DPR RI.

Adang Daradjatun

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

Scan QR untuk berita selengkapnya



RUU Hak Paten Lindungi Varietas Asli Indonesia

Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah. Kekayaan alam ini di antaranya adalah spesies dan varietas-varietas yang memiliki banyak akan nilai manfaat. Namun seringkali spesies dan varietas ini dicuri oleh inventor dari luar.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Paten DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa pun mendukung adanya penguatan perlindungan bagi spesies dan varietas alami yang dimiliki Indonesia agar tidak terus dicuri oleh para inventor luar.

“Saya rasa kita memang perlu memperkuat dan awal mula kita memperkuat bagaimana agar tidak terjadi pencurian-pencurian tersebut adalah bagaimana kita memperkuat undang-undang yang kita miliki salah satunya adalah undang-undang paten



Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Paten DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa dalam Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

JADI SAYA SANGAT SETUJU APABILA PEMERINTAH MEMPERKETAT BAGAIMANA AGAR VARIETAS-VARIETAS YANG ALAMI, YANG UNIK YANG KITA MILIKI INI TIDAK TERUS DICURI OLEH PARA INVENTOR-INVENTOR APALAGI INVENTOR LUAR.

Adde Rosi Khoerunnisa

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Paten DPR RI

ini,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).

Tambahnya, selaku anggota Komisi III DPR RI yang memang bidangnya berurusan dengan hukum. Dirinya setuju untuk Pemerintah lebih memperketat perlindungan bagi spesies dan varietas Indonesia. Karena memang sering terjadi adanya pencurian dan penyalahgunaan.

“Jadi saya sangat setuju apabila Pemerintah memperketat bagaimana agar varietas-varietas yang alami, yang unik yang kita miliki ini tidak terus dicuri oleh para inventor-inventor apalagi inventor luar,” tegasnya. **gal/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Apresiasi Setjen DPR RI dan Antusiasme Mahasiswa

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengapresiasi Setjen DPR RI sebagai penyelenggara Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Apresiasi ini juga diberikan kepada para 350 mahasiswa yang sangat antusias sebagai peserta program magang MBKM.

"Sekali lagi saya apresiasi Setjen DPR dan mahasiswa yang sudah mengambil magang di rumah rakyat ini. Saya yakin banyak pengalaman dan beberapa pengalaman yang bisa dijadikan materi diskusi, *sharing* ke teman-teman di kampusnya masing-masing di berbagai provinsi di Indonesia," ujar Syaiful saat menyampaikan acara Penutupan Kampus Merdeka Magang di Rumah Rakyat DPR RI Tahun 2024 di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6).

Dengan bekal pengalaman tersebut, lanjut Politisi dari Fraksi PKB ini, pihaknya meyakini ke depan



Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat acara Penutupan Kampus Merdeka Magang di Rumah Rakyat DPR RI Tahun 2024 di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

magang ini akan bermanfaat bagi diri masing-masing mahasiswa. Terlebih lagi jika memang ada yang tertarik dan berminat di dunia politik dan menjadi seorang legislator.

Dalam kesempatan itu Syaiful

Huda juga sejatinya berharap setiap gelombang atau setiap tahunnya peserta dari Kampus Merdeka Magang di Rumah Rakyat DPR RI bisa terus bertambah. Sehingga, ada banyak mahasiswa di berbagai daerah yang terfasilitasi untuk bisa melihat secara langsung kerja DPR RI.

Namun, ia mendapat informasi bahwa 350 orang peserta MDRR ini jumlahnya sudah terbilang ideal. Pasalnya, tidak sedikit mentor dan para ahli di bidang pendidikan yang meyakini bahwa terlalu banyak peserta magang malah tidak akan efektif dalam memperkenalkan dan menyampaikan informasi terkait fungsi dan kerja DPR RI selama ini.

— ayu,rio/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Kinerja Anggaran Setjen DPR Dipastikan Optimal

Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi (Monev) Semester I-2024 bertema "Optimalisasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI". Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa rapat kerja tersebut memiliki peran yang sangat strategis bagi kesetjanaan DPR untuk memastikan target kinerja anggaran yang sudah disepakati bersama berjalan dengan optimal.

Ia pun mengapresiasi kinerja jajarannya dalam upaya mengoptimalkan kinerja anggaran Kesetjanaan DPR. "Karena dua tahun belakangan ini, DPR sudah berhasil mencapai IKPA yang maksimal, maka dapat penghargaan dari Menteri Keuangan," ucapnya kepada Parlemenaria di sela pertemuan rapat monev DPR RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (5/7).



FOTO : MRI/PDT

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar di sela pertemuan rapat monev DPR RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (5/7/2024).

Diketahui bahwa sejak tahun 2022 Setjen DPR RI masuk dalam nominasi Kementerian/Lembaga dengan kinerja anggaran terbaik. Teranyar,

Setjen DPR berhasil meraih dua penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Award 2023 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penghargaan yang diraih adalah peringkat ke-III untuk kategori nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan pagu besar di atas Rp750 miliar dan peringkat ke-III untuk kategori implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

"Tahun kemarin itu kan (2023) realisasi kita mencapai 96 persen lebih, hampir 97 persen. Bahkan di tahun sebelumnya (2022) 98 persen. Di tahun ini (2024) kita berupaya untuk sebaik-baiknya realisasi itu bisa lebih baik dari tahun lalu, dengan catatan tidak mengurangi kualitas dari kegiatan yang dilakukan," jelas Indra. **srw/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



PROGRAM
TNR
PARLEMEN

KABAR
NUSANTARA

09.30 & 15.30 WIB.
Senin, Rabu & Jumat.

HOUSE
NEWS

08.00 WIB.
Senin s.d Jumat.

PEREMPUAN
Parlemen
Maju terus perempuan Indonesia

10.00 WIB.
Senin s.d Jumat.

DARI
RUANG
SIDANG

11.00 & 13.30 WIB.
Senin s.d Jumat.

SAKSIKAN HANYA DI

<https://tvrparlemen.dpr.go.id/>

SCAN
HERE!!

